

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK
OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA
TANJUNGPINANG**

**Oleh:
Indri Iestari
Nim. 2205010077**

ABSTRAK

Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Faktor sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, kurangnya perhatian orang tua, kondisi keluarga yang tidak harmonis, serta anggapan bahwa kekerasan merupakan bentuk disiplin yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan kepada pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat serta aktor yang terlibat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang fokus pada konteks implementasi meliputi kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik melalui regulasi berupa Peraturan Daerah serta keterlibatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, kepolisian, dan lembaga pendidik. Struktur organisasi dinilai cukup jelas meskipun masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia. Kepatuhan dan daya tanggap juga didukung oleh Standar operasional prosedur serta inovasi layanan FITA dan Molin Sigap 24 Jam dalam 7 Hari. Implementasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Tanjungpinang telah berjalan cukup baik, namun masih perlu dioptimalkan kembali melalui peningkatan sumber daya manusia serta sosialisasi yang lebih rutin dan menyeluruh.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pencegahan Kekerasan Anak, Perlindungan.

**IMPLEMENTATION OF CHILD VIOLENCE PREVENTION POLICY BY
THE DEPARTMENT OF WOMEN'S EMPOWERMENT, CHILD
PROTECTION AND COMMUNITY EMPOWERMENT OF
TANJUNGPINANG CITY**

**By:
Indri Lestari
Nim: 2205010077**

ABSTRACT

Every child has the right to obtain protection from all forms of violence as stipulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Children are a vulnerable group that needs protection from their families and the surrounding environment. Social and economic factors such as poverty, lack of parental attention, disharmonious family conditions, and the assumption that violence is a form of discipline that causes violence against children. This study aims to determine the implementation of policies by the Tanjungpinang City Women's Empowerment, Child Protection, and Community Empowerment Office in the prevention of violence against children in Tanjungpinang City. The research method used is qualitative with a descriptive approach, with data collection techniques through observation, interviews, documentation, and literature studies. Interviews were conducted with the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment as well as actors involved in efforts to prevent violence against children in Tanjungpinang City. This study uses Merilee S. Grindle's policy implementation theory which focuses on the implementation context including the power, interests, and strategies of actors, characteristics of institutions and rulers, as well as compliance and responsiveness. The results of the study show that the implementation of the policy has been running quite well through regulations in the form of Regional Regulations and the involvement of the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children, the Family Learning Center, Community-Based Integrated Child Protection, the police, and educational institutions. The organizational structure is considered quite clear even though there are still limited human resources. Compliance and responsiveness are also supported by operational standards, procedures, and service innovations of FITA and Molin Sigap 24 Hours in 7 Days. The implementation of the policy to prevent violence against children in Tanjungpinang City has gone quite well, but it still needs to be re-optimized through increasing human resources and more routine and thorough socialization.

Keywords: Policy Implementation, prevention of child violence, Protection.